



KORAN	HAL
Haluan	1&7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

## SERAHKAN LKPD 2020

# Gubernur Sumbar Bidik Target Opini WTP Ke-9

**PADANG, HALUAN—** Sebagai wujud dari komitmen Pemprov Sumbar untuk terus berupaya menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, Gubernur Sumbar Mahyeldi secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumbar

Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Rabu (10/3). Gubernur Mahyeldi menyebutkan, LKPD diserahkan sebagai bahan audit bagi BPK Perwakilan Sumbar untuk mengukur

>> GUBERNUR hal 07

akurasi antara kemampuan keuangan dengan capaian pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Alhamdulillah hari ini kita serahkan LKPD ke BPK, dengan harapan kita dapat meraih opini WTP ke sembilan kalinya. Kita di Pemprov Sumbar akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, memertahankan tansparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan," ujar Mahyeldi yang kerap disapa Buya tersebut.

Hadir mendampingi Buya Mahyeldi saat penyerahan LKPD, Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Sumbar Beni Warlis, Kepala Bakeuda Sumbar Zaenudin, Staf Ahli Keuangan Dellyarti, dan Kepala Biro Humas Hefdi. LKPD diserahkan langsung kepada pelaksana harian (Plh) Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Nofemris, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jalan Khattib Sulaiman, Kota Padang.

"Tentunya kita akan terus support keperluan yang dibutuhkan BPK dalam pemeriksaan ini, baik berupa data, personil, dan bukti bukti lainnya yang dibutuhkan. Kapan perlu, kita tak akan izinkan OPD keluar daerah selama pemeriksaan berlangsung," kata Buya Mahyeldi lagi.

Gubernur berharap, agar predikat opini WTP dari BPK RI dapat dipertahankan oleh Pemprov Sumbar setiap tahun. Sehingga, sasaran untuk peningkatan



pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan. Ia juga memberikan apresiasi pada BPK atas predikat opini WTP yang dicapai Sumbar selama ini, yang tentu tak luput dari bimbingan dari pembinaan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar.

"Pemeriksaan ini adalah kepentingan kita. Jika kurang data dan fakta yang disampaikan, maka akan tersaji laporan yang kurang pula. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada semua pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, agar senantiasa bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan data-data kepada petugas auditor BPK," kata Gubernur lagi.

Di sisi lain, Plh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Nofemris turut mengapresiasi Pemprov Sumbar yang relatif cepat dalam menyerahkan LKPD ketimbang povinsi lain. Ia juga memuji komitmen pihak-pihak

yang terlibat di dalamnya, yang dinilai cukup akurat dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Sumbar.

"Sebetulnya kami sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan sejak sebulan Februari 2021, dan baru berakhir 4 Maret 2021 lalu. Alhamdulillah lancar, dan mulai tanggal 15 maret 2021 ini masuk pada pemeriksaan pendalaman. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 2 tim, yaitu satu tim pemeriksaan laporan keuangan daerah dan satu tim pemeriksaan kinerja infrastruktur," kata Nofemris.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 56 dinyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota wajib menyerahkan laporan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir. Artinya, masih ada tenggat penyerahan laporan hingga 31 Maret mendatang.

"Setelah menerima laporan ini, kami akan langsung bekerja. Waktu penyerahannya LKPD saat ini termasuk cepat, di mana menurut ketentuan sebenarnya, Pemprov masih punya waktu hingga 31 Maret mendatang untuk menyerahkan. Jadi, ini berarti lebih awal," kata Nofemris lagi. (h/mg-dar/adv)